

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidik PAUD memiliki peranan dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan anak usia dini, yaitu sebagai motivator, pemantau, mentor, fasilitator dan innovator (Puspita, 2009). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 dikatakan bahwa seorang guru haruslah memiliki 4 kompetensi, yakni kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional yang diberikan dengan sertifikat pendidikan yang diperoleh melalui sertifikasi (Perpu No 19 Tahun 2005, 2005). Oleh karenanya, Guru PAUD harus menjadi pendidik yang profesional. Pendidik profesional adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi (Pusari, 2013). Pendidik PAUD harus mempertahankan profesinya dengan bertanggung jawab melalui usaha-usaha kreatif untuk terus meningkatkan diri dengan terus menerus belajar (Christianti, 2015).

Berdasarkan data Kemendikbud, jumlah guru PAUD di Indonesia sebanyak 66.945 guru dengan jumlah guru berkualifikasi S1 sebanyak 53% dan jumlah guru belum berkualifikasi S1 sebanyak 47%. Linearitas kualifikasi guru PAUD yang berasal dari bidang studi PAUD hanya sebesar 1,27% (Kemendikbud, 2021). Berdasarkan data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pada Tahun Ajaran 2019/2020 sebesar 91,76 persen guru masuk dalam kualifikasi layak mengajar. Persentase tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun ajaran sebelumnya sebesar 89,33 persen. Jumlah guru yang layak mengajar juga mengalami peningkatan dibanding tahun ajaran sebelumnya. Peningkatan ini secara umum tentunya belum cukup mampu mengukur bagaimana kualitas guru. Namun setidaknya hal ini sudah mengindikasikan bahwa kualitas guru menjadi semakin lebih baik (Kemendikbud, 2019).

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menunjukkan sebanyak 715 guru TK sudah memiliki ijazah S1 dan sisanya belum. Sementara pada pendidik PAUD Nonformal yang sudah memiliki ijazah S1 hanya sebanyak 35%. Permasalahan kualifikasi dan pengakuan guru PAUD hampir terjadi di seluruh Indonesia, begitupun di Kota Bandung, jumlah Guru PAUD Nonformal di Kota Bandung sebanyak 1.975 orang sebanyak 56% merupakan lulusan SMA (<https://dapo.kemdikbud.go.id/>, 2021).

Profesionalisme bagi guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), utamanya dapat diukur dari sejauhmana kemampuan mengaktualisasikan kompetensi yang dipersyaratkan. Empat kompetensi inti guru yang dijabarkan ke dalam kompetensi guru PAUD bermuara pada pengaktualisasian profesionalisme. Profesionalisme salah satunya disebabkan oleh linearitas latar belakang Pendidikan. Jumlah Guru PAUD di Jawa Barat dengan linieritas pendidikan PAUD hanya sebesar 1,54% dan sisanya tidak linier. Disamping itu, rata-rata lama kerja Guru PAUD di Jawa Barat telah mengajar selama 10-19 tahun sebanyak 34.443 guru (Kemendikbud, 2021). Meskipun, kualifikasi akademik yang masih rendah yaitu lulusan SMA dan tidak liniernya Pendidikan Guru PAUD, kompetensinya sudah cukup baik dan sesuai dengan kompetensi profesional guru saat mengajar (Sulikah, 2018).

Yusutria (2019) juga mengemukakan bahwa kendala utama lembaga PAUD yaitu kualifikasi pendidikan pendidik, pengalaman pendidik, sarana prasarana, pengelolaan, dan kesejahteraan. Pelatihan adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh kepala PAUD maupun guru untuk meningkatkan kompetensi guru (Rochayadi, 2014). Upaya meningkatkan profesionalisme guru PAUD juga dilakukan dengan memberikan beasiswa, *workshop*, seminar, fasilitas sarana prasarana yang memadai, serta tetap menjaga lancarnya komunikasi baik dengan pihak yayasan, guru, dan orang tua (Yusutria, 2019). Peningkatan kualitas melalui pelatihan mengarah pada pembangunan pendidikan yang bermutu, membentuk pendidik dan tenaga kependidikan yang handal, produktif, kreatif, dan berprestasi (Zahriani Jf &

Abdul Latif, 2020). Upaya-upaya ini meningkatkan kompetensi guru PAUD, sehingga dapat lebih baik dalam memberikan layanannya (Christianti, 2015). Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja guru yang telah mengikuti pelatihan lebih baik dari pada guru yang belum pernah mengikuti pelatihan (Andriana et al., 2018).

Upaya peningkatan kompetensi guru PAUD terus dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Salah satu programnya yaitu Program Guru Belajar yang diluncurkan Ditjen GTK Kemendikbud telah diikuti sebanyak 203 Guru PAUD dan sebanyak 41 juta guru di Indonesia telah mengakses Portal Guru Belajar untuk mendapatkan berbagai materi mengajar (Kemdikbud.go.id, 2020). Sejak 2011 hingga 2015, GTK PAUD yang telah mengikuti Diklat Berjenjang tingkat dasar mencapai 125.902 orang (Kemdikbud.go.id, 2020). Di Kota Bandung, setiap tahunnya sebanyak 80-90 Guru PAUD mengikuti Diklat Berjenjang khusus untuk Guru PAUD (disdikbandung.go.id, 2020). Selain itu, selama Pandemi COVID 19 Ditjen GTK mengadakan seminar Seri Guru Belajar dimana ada 5-6 webinar setiap harinya (Kemdikbud.go.id, 2020).

Partisipasi guru PAUD dalam mengikuti pelatihan, seminar, dan kegiatan lainnya dapat menjadi bukti portofolio untuk pengakuan hasil belajar lampau sebagai upaya percepatan kualifikasi guru PAUD menjadi S1. Program pengakuan hasil belajar lampau pernah dilakukan di PLS UPI pada tahun 2010 dan 2011 dengan sasaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Nonformal dimana mayoritas merupakan guru PAUD Nonformal. Program ini belum dilakukan lagi hingga sekarang di PLS UPI namun terdapat universitas lain yang menyelenggarakan program ini tetapi mekanismenya berbeda. Peneliti membatasi kajian ini hanya pada program pengakuan hasil belajar lampau yang pernah dilakukan di PLS UPI Tahun 2010-2011.

Latar belakang adanya permasalahan pada kualifikasi guru PAUD dan adanya peluang dilakukannya Pengakuan Hasil Belajar Lampau (PHBL) yang pernah dilakukan sebelumnya di jurusan PLS UPI, serta melihat komparasi

model-model RPL dari beberapa negara menjadi dasar peneliti untuk melakukan kajian ini. Perlunya suatu alur pengakuan yang jelas atas usaha pendidik masyarakat dalam melakukan proses pembelajaran secara nonformal dan informal. Hal tersebut yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan kajian mengenai Pelaksanaan Kebijakan Pengakuan Hasil Belajar Lampau Pendidikan Nonformal Tahun 2010-2011 di Kota Bandung untuk mendapatkan temuan-temuan yang bisa memberikan rekomendasi di masa depan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu

1. Bagaimana sistem pelaksanaan Pengakuan Hasil Belajar Lampau dalam layanan Pendidikan nonformal yang berlangsung di beberapa negara?
2. Bagaimana pelaksanaan pengakuan hasil belajar lampau yang telah dilakukan pada pengakuan hasil belajar lampau di Indonesia dan berlangsung pada program S1 PLS FIP UPI?
3. Bagaimana rekomendasi model pada pengakuan hasil belajar lampau?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis sistem pelaksanaan Pengakuan Hasil Belajar Lampau dalam layanan Pendidikan nonformal yang berlangsung di beberapa negara
2. Untuk menganalisis pelaksanaan pengakuan hasil belajar lampau yang telah dilakukan pada pengakuan hasil belajar lampau di Indonesia dan berlangsung pada program S1 PLS FIP UPI
3. Untuk memformulasikan rekomendasi model pengakuan hasil belajar lampau mengacu pada model yang telah ada

D. Urgensi dan Manfaat

Manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis penerapan pengakuan hasil belajar lampau yang telah dilakukan
2. Untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia terutama profesionalitas pendidik masyarakat
3. Untuk menjadi bahan dukungan kebijakan dalam melakukan pengakuan hasil belajar melalui pendidikan nonformal dan informal

E. Struktur Organisasi Tesis

Penyusunan tesis ini disusun sesuai dengan sistematika penulisan yang ditetapkan dalam Pedoman Karya Ilmiah, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, dan struktur organisasi tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, kajian pustaka berisi konsep-konsep, dalil-dalil, hukum-hukum, model-model, dan rumus-rumus utama serta turunannya dalam bidang yang dikaji. Pemaparan kajian pustaka dalam tesis lebih bersifat analitis dan sumatif, mencakup isu-isu metodologis, teknik penelitian dan juga topik-topik yang berkaitan

BAB III METODE PENELITIAN, bagian ini bersifat prosedural, berisi pola paparan yang digunakan dalam menjelaskan metode penelitian yang berisi desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN, bab ini berisi mengenai temuan penelitian berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian dan pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB V SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI, berisi simpulan, implikasi, dan rekomendasi, yang menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari hasil penelitian.